

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN, PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA, KAWASAN PARIWISATA, JASA
INFORMASI PARIWISATA, DAN JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DISAMPAIKAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020")**



**PT RESOURCE ALAM INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Bidang Usaha

Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Real Estat, Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Industri Pengolahan, dan Pengangkutan dan Pergudangan

Kantor Pusat:

Bumi Raya Utama Group Building
Jl. Pembangunan I No. 03, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10190
Telepon: (021) 633 3036 (Hunting) ; (021) 3952 5530
Faksimili: (021) 633 7006
E-mail: info@raintbk.com
Website: www.raintbk.com

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2026

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web BEI dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) POJK No. 17/2020. Perseroan juga menyediakan data pendukung mengenai perubahan kegiatan usaha kepada pemegang saham sejak saat Pengumuman RUPS serta dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c POJK No. 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha, dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha Perseroan yang terlebih dahulu perlu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“RUPST”) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2026.

II. URAIAN SINGKAT PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berdasarkan anggaran dasarnya dapat melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Real Estat, Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Industri Pengolahan, dan Pengangkutan dan Pergudangan.

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama PT Kurnia Kapuas Utama Glue Industries sebagaimana termuat dalam Akta No. 32 tanggal 8 Juli 1981 yang dibuat di hadapan Didi Sudjadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. Y.A.5/27/4 tanggal 16 Maret 1982 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 20 Mei 1986, Tambahan No. 690. Selanjutnya, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan nama menjadi PT Kurnia Kapuas Utama Tbk.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kurnia Kapuas Utama Tbk No. 15 tanggal 5 September 2003, yang dibuat di hadapan Elisabeth Veronika Ely, S.H., Notaris di Pontianak, nama Perseroan telah diubah dari PT Kurnia Kapuas Utama Tbk menjadi PT Resource Alam Indonesia Tbk. Akta tersebut telah disahkan oleh

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.C-27044.HT.01.04.TH.2003 tanggal 12 November 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan No. 5984.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Resource Alam Indonesia Tbk No. 21 Tanggal 17 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0161492 tanggal 18 Juni 2025 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0299840 tanggal 18 Juni 2025.

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang:

- a. Pertambangan dan Penggalian;
- b. Perdagangan Besar dan Eceran;
- c. Real Estat;
- d. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
- e. Industri Pengolahan; dan
- f. Pengangkutan dan Pergudangan.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	20.000.000.000	10	200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000.000.000		50.000.000.000

Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persen (%)
1.	PT SEJAHTERA JAYA CITA	1.391.585.329	27,83
2.	BOS LTD S/A SINAR NUSANTARA SDN. BHD.	413.611.772	8,27
3.	UBS AG SINGAPORE S/A ENERGY COLLIER PRIVATE LTD.	1.855.447.105	37,11
4.	LX INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.	260.372.700	5,21

5.	Masyarakat Lainnya	1.078.983.094	21,58
TOTAL		5.000.000.000	100

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Resource Alam Indonesia Tbk No. 15 Tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0369350 tanggal 03 Februari 2026, susunan pengawas dan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Pintarso Adijanto	: Direktur Utama
Agoes Soegiarto Soeparman	: Direktur
Wimpi Salim	: Direktur
Winanto	: Direktur
Eddy	: Direktur
Tan Ying Mei	: Direktur
Hendro Martowadojo	: Komisaris Utama
Suparno Adijanto	: Komisaris
Ge Luiyanto Yamin	: Komisaris Independen
Wonchil Yu	: Komisaris
Darma Putra Wati	: Komisaris Independen

III. URAIAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

1. Ringkasan Laporan Penilai

Sehubungan dengan rencana penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) baru, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di Kementerian Keuangan, yaitu KJPP Felix Sutandar dan Rekan (“**Penilai**”), sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang rencana penambahan KBLI baru. Berikut adalah ringkasan dari laporan studi kelayakan berdasarkan Laporan Ref. No: 00267/2.0072-00/BS/04/0022/1/IV/2026 tanggal 24 April 2026 (“**Laporan Studi Kelayakan**”).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Studi Kelayakan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan adalah untuk melakukan analisa dan pengkajian mengenai kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan POJK 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Adapun KBLI yang akan ditambahkan adalah sebagai berikut:

No.	Nomor KBLI	Keterangan
1.	52101	Pergudangan Dan Penyimpanan
2.	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya
3.	68120	Kawasan Pariwisata
4.	79911	Jasa Informasi Pariwisata
5.	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata

3. Tanggal Studi Kelayakan

Tanggal batas (*cut-off date*) dari laporan Studi Kelayakan ini adalah 31 Desember 2025. Pemilihan tanggal Studi Kelayakan didasarkan atas tujuan Studi Kelayakan, aturan yang ada dan ketersediaan data.

4. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Studi Kelayakan ini bersifat non-disclaimer opinion.
- b. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses Studi Kelayakan .
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
- e. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Studi Kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan dan Kesimpulan Akhir.
- h. Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Studi Kelayakan dari Pemberi Tugas.

5. Metodologi

Prosedur yang digunakan adalah analisis Studi Kelayakan adalah sebagai berikut:

- a. Kelayakan pasar;
- b. Kelayakan teknis;
- c. Kelayakan pola bisnis;
- d. Kelayakan model manajemen; dan
- e. Kelayakan keuangan.

6. Pendapat atas Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha

- a. **Dari kajian kelayakan pasar**, dengan adanya penambahan KBLI, maka tidak ada perubahan pangsa pasar, potensi pasar dan potensi nilai pasar Perseroan, karena tidak menimbulkan perubahan atas kegiatan operasional Perseroan ke depannya. Rencana penambahan KBLI hanya untuk penyesuaian legalitas atas kegiatan penyewaan gudang yang telah berjalan dan proses sertifikasi tanah.
- b. **Dari kajian kelayakan teknis**, menunjukkan bahwa secara legalitas, dengan adanya penambahan KBLI, maka ke depannya, perijinan Perseroan terkait klasifikasi KBLI yang dimiliki menjadi sesuai dengan kegiatan usahanya yang telah berjalan selama ini. Selain itu, dengan penambahan KBLI, maka Perseroan akan mampu melanjutkan proses sertifikasi atas tanah yang berada dalam zona pariwisata.
- c. **Dari kajian kelayakan pola bisnis**, menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan usaha, maka pola bisnis Perseroan tidak mengalami perubahan, karena tidak menimbulkan perubahan atas kegiatan operasional Perseroan ke depannya. Rencana penambahan KBLI hanya untuk penyesuaian legalitas atas kegiatan penyewaan gudang yang telah berjalan dan proses sertifikasi tanah.
- d. **Dari kajian kelayakan model manajemen**, menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan usaha, maka model manajemen Perseroan tidak mengalami perubahan, karena tidak menimbulkan perubahan atas kegiatan operasional Perseroan ke depannya. Rencana penambahan KBLI hanya untuk penyesuaian legalitas atas kegiatan penyewaan gudang yang telah berjalan dan proses sertifikasi tanah.
- e. **Pada kajian kelayakan keuangan**, penambahan KBLI Perseroan dinilai layak karena memberikan manfaat secara kuantitatif yaitu peningkatan perolehan laba bersih sebesar USD 213.900 pada tahun 2026, USD 2.858.424 pada tahun 2027, dan sebesar USD 238.255 pada tahun 2028-2030 dibandingkan Tanpa Penambahan KBLI.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diungkapkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dimaksud adalah "**LAYAK**".

IV. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Dengan adanya penambahan usaha, tidak ada perubahan terkait ketersediaan dan kualitas sumber daya, dan ahli professional Perseroan, karena rencana penambahan KBLI hanya untuk penyesuaian legalitas atas kegiatan penyewaan gudang yang telah berjalan dan proses sertifikasi tanah. Sehingga,

dengan penambahan KBLI, tidak menimbulkan perubahan atas kegiatan operasional perseroan ke depannya.

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan merupakan perusahaan dengan bidang usaha terutama bergerak di bidang pertambangan batubara yang berlokasi di wilayah Kutai Kartanegara dan sekitarnya. Saat ini Perseroan berencana untuk melengkapi KBLI yang dimilikinya dengan menambah beberapa KBLI yaitu:

- a. KBLI 52101 – Pergudangan Dan Penyimpanan
- b. KBLI 55900 – Penyediaan Akomodasi Lainnya
- c. KBLI 68120 – Kawasan Pariwisata
- d. KBLI 79911 – Jasa Informasi Pariwisata
- e. KBLI 79912 – Jasa Informasi Daya Tarik Wisata

Penambahan KBLI 52101 dilakukan sehubungan dengan kepemilikan bangunan gudang oleh Perseroan yang berlokasi di Jalan Ampera, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Samarinda yang dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dan saat ini disewakan kepada PT Unilever Indonesia Tbk. Oleh karena itu, Perseroan bermaksud menambahkan KBLI 52101 guna menyesuaikan kegiatan usahanya dengan aktivitas penyewaan gudang tersebut.

Selain itu, Perseroan memiliki lahan kosong yang belum bersertifikat (tanah girik) yang berlokasi di wilayah Samarinda dan Kutai Kartanegara. Lahan tersebut sebelumnya merupakan area tambang batubara yang telah selesai ditambang dan reklamasi, sehingga saat ini tidak dimanfaatkan dan berada dalam kondisi kosong.

Perseroan berencana untuk melakukan sertifikasi atas lahan tersebut. Namun, proses sertifikasi menghadapi kendala terkait dengan penetapan zonasi wilayah, di mana sebagian lahan di Kutai Kartanegara berada dalam zona pariwisata. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan disyaratkan untuk memiliki KBLI yang terkait dengan kegiatan pariwisata sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi.

Selain untuk memenuhi persyaratan zonasi, sertifikasi lahan juga perlu dilakukan oleh Perseroan guna menghindari risiko penetapan sebagai tanah terlantar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025, tanah yang tidak diusahakan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar, yang berpotensi mengakibatkan pencabutan hak atas tanah dan penguasaan oleh negara.

VI. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KBLI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dengan adanya penambahan kegiatan usaha, maka dampak terhadap keuangan Perseroan ke depannya adalah:

- a. Investasi Properti Perseroan akan lebih tinggi karena mampu mengamankan kepemilikan atas tanah sebesar USD 5.522.224 yang terdiri dari nilai buku tanah girik sebesar USD 3.359.192 dan biaya sertifikasi yang dikapitalisasi ke dalamnya sebesar USD 2.163.032.
- b. Pendapatan Perseroan akan meningkat karena mampu melanjutkan kegiatan usaha penyewaan gudang sehingga menambah pendapatan Perseroan sebesar USD 274.231 pada tahun 2026 dan sebesar USD 305.455 pada tahun 2027-2030.

VII. HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

1. RUPST dan Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas penambahan kegiatan usaha dan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan melalui RUPST pada tanggal 18 Juni 2026.

2. Kepatuhan Regulasi

Penambahan kegiatan usaha dilakukan dengan mengacu pada KBLI sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, serta dengan memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi dan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

VIII. TAMBAHAN INFORMASI

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan di:

PT RESOURCE ALAM INDONESIA TBK

Bumi Raya Utama Group Building

Jl. Pembangunan I No. 03, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10190

Telepon: (021) 633 3036 (Hunting) ; (021) 3952 5530

Faksimili: (021) 633 7006

Website: www.raintbk.com

E-mail: info@raintbk.com